

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

Faktor pendorong partisipasi perempuan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan kesehatan reproduksi adalah adanya dukungan dari keluarga (suami), relasi kekerabatan, adanya fasilitator (pihak luar), pemerintah desa berkomitmen pada pemberdayaan perempuan, tumbuhnya kemampuan serta kemauan perempuan untuk berpartisipasi. Dengan demikian dapat bermakna bahwa partisipasi perempuan merupakan kecenderungan yang lebih menekankan pada proses memberikan suatu stimulasi, mendorong atau memotivasi individu (bersifat ekstrinsik) agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan (bersifat instrinsik) dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

Partisipasi perempuan dalam tahapan proses perumusan kebijakan kesehatan reproduksi di desa, adalah dimulai dari menumbuhkan kesadaran mengenai kesehatan reproduksi perempuan melalui serangkaian identifikasi dan edukasi, perempuan juga berperan penting dalam mengkonsolidasikan dukungan dari sesama perempuan desa, tidak hanya dalam wadah kader kesehatan semata, namun juga mengkonsolidasikan diri melalui aktivitas pendukung yaitu penyediaan kebun gizi, pelatihan pertanian, serta peningkatan akses pendapatan bagi perempuan miskin. Selanjutnya adalah proses menyusun rancangan kebijakan, mengkonsultasikannya, dan bekerjasama dengan berbagai stakeholder. Ini bermakna perempuan telah mengambil peran ‘politis’, ditandai oleh partisipasi sebagai sebuah proses (instrumental) maupun sebagai sebuah tujuan (transformasional). Partisipasi berupa instrumental yang terjadi disana dapat dilihat melalui prosedur yang ditempuh dalam perumusan kebijakan, sedangkan partisipasi transformasional dapat dilihat saat partisipasi telah dipandang sebagai pematapan dialog antar perempuan dengan perempuan, dialog dengan kelompok masyarakat

Raji Supriyadi, 2023

PARTISIPASI PEREMPUAN DESA DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN REPRODUKSI (STUDI KASUS AKSI KOLEKTIF PEREMPUAN DI DESA SAMPIRAN KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

setempat serta dengan pemerintah desa, dengan tujuan, partisipasi menghasilkan pemberdayaan, yakni setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya.

Bentuk-bentuk perubahan yang terjadi pada perempuan dalam implementasi kebijakan kesehatan adalah perubahan pada dimensi personal, komunitas dan institusional. Dimana, fasilitasi program pemberdayaan perempuan diorientasikan pada penguatan individu, kelompok secara sosial, dan institusional yang merespon tuntutan peningkatan kesehatan perempuan melalui perumusan kebijakan dari aspek sumber daya, termasuk kebijakan yang terpadu dan berkesinambungan.

5.2 Implikasi

Penelitian tentang partisipasi perempuan dalam merumuskan kebijakan kesehatan reproduksi, seyogyanya menjadi bentuk pendidikan masyarakat berbasis gender. Implikasi dalam penelitian ini memberikan gambaran setidaknya perempuan juga merupakan aktor pembangunan di desa yang penting dan strategis. Adanya penelitian ini juga memberikan kajian bahwa setiap perempuan desa diharapkan memberikan sumbangsinya turut memikul beban pembangunan, melalui pemberian kesempatan, kemampuan dan kemauan perempuan untuk menyelesaikan agenda-agenda pembangunan desa.

Sedangkan implikasi dalam konteks pendidikan, tumbuh kembangnya partisipasi perempuan desa sebagai perwujudan sarana dalam peningkatan kemampuan atau kapasitas perempuan untuk dapat merespon peluang, tantangan dan masalah sosial baru yang semakin kompleks di desa. Tingginya tingkat kapasitas perempuan, semakin tinggi pula dorongan untuk berperan sebagai subjek dalam kerangka penguasaan serta pengelolaan pembangunan.

Dalam konsteks Pendidikan Masyarakat, sudah barang tentu menjadi suatu bentuk pengembangan keilmuan dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat secara umum juga pemberdayaan perempuan secara khusus. Dimana Pendidikan Masyarakat memiliki banyak peluang dan perhatian guna ‘memerdekakan’ mereka para perempuan desa yang tingkat pendidikannya masih tertinggal jauh, terpinggirkan, terdiskriminasi secara politis, juga mereka yang menderita karena dihadapan pada berbagai bentuk

ketidakadilan lainnya. Dalam hal ini pendidikan masyarakat juga dapat merespon untuk mengembangkan potensi dan mendinamisasikan kekuatan perempuan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

5.3 Rekomendasi

Hasil penelitian mengenai partisipasi perempuan desa dalam perumusan dan implementasi kebijakan kesehatan memberikan catatan berupa rekomendasi, sebagai berikut:

5.3.1 Bagi pemangku kepentingan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu arah bagi pemangku kepentingan (pemerintah desa, organisasi masyarakat, akademisi, pelaku usaha (swasta) dan media) kaitannya dengan pembangunan desa. Pembangunan tidak sekedar ditujukan untuk peningkatan akses atas sumber serta perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun pembangunan didefinisikan juga menyangkut proses bagaimana manfaat itu diperoleh. Proses ini melibatkan partisipasi kelompok sasaran dalam hal ini perempuan desa, baik sebagai penerima atau pemanfaat maupun sebagai aktor pembangunan yang mampu mengenal dan dapat mengatasi masalahnya sendiri. Pemberdayaan perempuan sebagai proses dalam mengatasi berbagai hambatan untuk pemerataan atau persamaan, baik bagi laki-laki maupun perempuan pada setiap tahapan proses pembangunan desa.

5.3.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih mendalam mengenai adaptasi perempuan desa saat tidak lagi didampingi “pihak luar”, memampukan daya *selfhelp* serta merespon perubahan dinamika politik lokal pasca pemilihan kepala desa, sehingga terwujud partisipasi yang berkelanjutan.